



PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 1, Telp. : (021) 8896 1767 Fax. 8895 2555
BEKASI

GUNTINGAN BERITA

HARIAN/MINGGUAN/MAJALAH : *Radar Bekasi*

TAHUN : *2024*

HARI : 1. SENIN 2. SELASA 3. RABU 4. KAMIS **5. JUM'AT** 6. SABTU 7. MINGGU

BULAN : I II III IV V VI VII VIII IX **X** XI XII

TANGGAL : 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31

HALAMAN : 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 KOL. 1 **2 3 4 5** 6 7 8 9 10
 Bersambung : 1 2 3 4 **5 6** 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 KOL. 1 2 3 4 **5 6 7** 8 9 10

Angkot Minta Perda Transportasi

BEKASI TIMUR - Pengusaha dan sopir Angkutan Kota (Angkot) meminta Peraturan Daerah (Perda) tentang transportasi. Hal ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kamis (3/10).

Perda transportasi ini dinilai penting untuk memperbaiki nasib Angkot, baik peremajaan kendaraan, pendapatan supir, hingga tata kelola transportasi termasuk operasional BTS. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi jalan tengah bagi Angkot yang saat ini kalah bersaing dengan BisKita Trans Bekasi Patriot.

Aspirasi tersebut disampaikan oleh pengusaha, supir angkot, serta perwakilan pengurus Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat.

"Saya dari DPD Organda Jawa Barat mendorong agar Raperda transportasi di Kota Bekasi untuk penataan itu lebih cepat," ungkap Ketua II DPD Organda Jawa Barat, Yaya Ropandi.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa sebagai kota jasa, Bekasi harus memiliki layanan transportasi yang layak. Menurutnya harus ada jalan tengah tanpa merugikan salah satu pihak,

dalam hal ini angkutan kota.

Aturan ini juga berguna untuk mengefektifkan rute Angkot maupun BisKita dalam penataan transportasi di Kota Bekasi. "Jangan sampai kita berpihak pada BisKita yang beroperasi, tapi angkutan kota mati, ini tidak seimbang," ucapnya.

Ia menekankan bahwa penataan transportasi harus sejalan dengan kondisi sosial masyarakat. Pemerintah juga harus memperhatikan keberpihakannya pada Angkot, salah satunya tentang pemberian subsidi.

Pasalnya, ia menyebut selama ini

KEPALA BAGIAN HUMAS

DIHATURKAN DENGAN HORMAT KEPADA :

1. Yth. BAPAK WALIKOTA
2. Yth. BAPAK WAKIL WALIKOTA
3. Yth. BAPAK ASDA III

pengusaha maupun supir Angkot telah memberikan subsidi secara tidak langsung kepada siswa sekolah. Pengurangan ongkos Angkot bagi siswa sekolah ini jika dirupiahkan mencapai miliaran rupiah.

"Kita setuju adanya BisKita, tapi ada unsur pelibatan dari pengusaha-pengusaha Angkot, juga harus mendapatkan hak yang sama," tambahnya.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi menyampaikan bahwa para pengusaha, supir, dan perwakilan Organda meminta agar kota Bekasi

► Baca *Angkot ...* hal 6

Angkot Minta Perda Transportasi

Sambungan dari Hal 5

membuat kebijakan sektor transportasi. Berdasarkan aspirasi yang telah diterima, kebijakan tersebut diminta untuk diwujudkan dalam bentuk Perda dan Perwal Kota Bekasi. Aspirasi tersebut akan

disampaikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot), serta akan menendang OPD terkait untuk membahas hal ini. "Nanti tindak lanjutnya akan kita teruskan surat ini kepada Pj wali kota, dan nanti Dishub dan jajarannya akan kita panggil untuk

menyelesaikan persoalannya," ungkapnya.

Sebelumnya, pengusaha dan sopir angkot menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Bekasi. Mereka menuntut keberpihakan pemerintah kepada angkutan kota. (sur)